

MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Nadziroh

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail: Nadnadz88@yahoo.com

Abstract: Expectation which still be remained from Indonesia nation in order to get out of various crisses is improving and repairing education system. National education is aimed at developing the competence of student to become pious and religious human wich have civilized bahaviour and kindnes, healthy, knowledgeable, capable, creative, self-supporting, and become democratic citizen and responsible. Civic education owns the strategic role in forming democratic and responsible citizen and bulilding the democratic society.Hoped competences after undergoing civic education is the owning of a set smart action, full of responsibility from a citizen in relating to state, and also able to have a share in solving various problem faced by the society, nation and state as according to proffesion capacities of each.

Keyword: Democratic citizen, National Education

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan zaman. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk membina suatu masyarakat.

Dari sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berusia sangat tua. Dalam konteks yang sederhana, dapat dipahami bahwa pendidikan telah ada sejak dimulai kehidupan manusia di dunia ini. Pada abad 21, pendidikan yang berlangsung telah modern, sehingga sangat berbeda dengan pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara manusia dengan perubahan-perubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang dilaluinya.

Kehidupan masyarakat pluralitas dan demokratis merupakan suatu tuntunan realitas masyarakat Indonesia. Sejauh mana dan bagaimanakah bentuk pluralitas dan demokrasi dari masyarakat Indonesia di masa depan, sesuai dengan asas *social reproduction*, akan tergantung pada bagaimana proses pendidikan berlangsung. Kualitas pendidikan, disamping ditentukan oleh berapa besar anggaran yang disediakan untuk pendidikan, juga ditentukan oleh keluarga, masyarakat dan tenaga profesional. Disinilah sesungguhnya kunci kemajuan pendidikan kita di masa depan (Zamroni, 2007 hal 81).

Tentang pendidikan ini dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945 dan diturunkan dalam Undang-Undang No 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar *menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan republik Indonesia. Negara Kesatuan republik Indonesia adalah *negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu*

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945).

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia di masa yang akan datang diharapkan tidak akan mengulangi lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus bertanggung jawab. Sebenarnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan adalah memiliki tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungannya dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur dan berdisiplin dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, bersikap rasional dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran nelenegara, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan warga negara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

Membangun Masyarakat yang Demokratis

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang dikenal dengan mata pelajaran “Civic” di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari “Civic Education” sebagai “*the body of knowledge*”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai “*the body of knowledge*” diarahkan untuk membangun masyarakat demokratis berkeadaban. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar legalitasnya dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan: “*Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai obyek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural dan kajian ilmiah kewarganegaraan.

Demikian pula pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistematis dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis untuk membangun kehidupan demokratis yang lebih baik. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan

dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia sangatlah diperlukan, karena proses pendidikan politik, demokrasi, dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator dapat dilihat pada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran HAM dimana-mana, komunikasi sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan dan kontrol sosial yang sering lepas dari tata krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara.

Pendidikan demokrasi dapat dilihat dalam dua setting besar, yaitu: “*school-based democracy education*” dan “*society-based democracy education*”. *school-based democracy education* merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, sedangkan “*society-based democracy education*” merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik. Sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation*, serta kemampuan untuk mengambil keputusan politik secara rasional sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri juga bagi masyarakat.

Oleh karena itu, outcome pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia adalah menyangkut pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga akan menjadi warga masyarakat yang baik yang mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera serta demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan pada diri peserta didik kultur demokratis, kemampuan dan skill dalam berinteraksi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu menghasilkan peserta didik yang berfikir kritis dan bertindak demokratis.

Materi pendidikan kewarganegaraan yang baik adalah apa yang ada pada kehidupan warga negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dapat menyajikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat, politik dan pemerintahan. Dalam era global sebagaimana

dewasa ini kehidupan suatu masyarakat dengan segala aspeknya tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan segala aspeknya tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global. Kehidupan dan sistem politik serta perilaku pemerintah tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang bersifat global.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka materi pendidikan kewarganegaraan mencakup:

1. Kajian berbagai konsep yang bersifat universal, seperti HAM, demokrasi, *open society*, order politik.
2. Sistem dan sejarah politik Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 berikut sejarah dan situasi kelahirannya
3. Bentuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia
4. Warga negara sebagai aktor utama dan hak-hak politiknya
5. *Civic education*, politik, pemerintahan, dan demokrasi ditinjau dari perspektif Islam. (Zamroni, 2007 hal 139)

Dengan memahami latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, maka diharapkan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan, paradigma pendidikan demokrasi secara sistematis dengan perkembangan *civic intelligence, civic participation, and civic responsibility* dari “*civic education*” merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional serta keberadaban khas Pancasila.

PENUTUP

Harapan bangsa Indonesia agar bisa terlepas dari berbagai krisis, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta membangun masyarakat demokratis.

Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, E. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansoer, Hamdan. 2003. *Strategi pembinaan MPK di Perguruan Tinggi*. Dirjen Dikti. Diknas, Bagian Proyek Pendidikan Tenaga Akademik 2003.
- Tilaar, H.A.R.2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*.Jakarta: Gramedia
- Muchson.2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru*. “Makalah Seminar 29 Maret 2003 UNS Surakarta.
- Print, Murray et al.1999.Civic Education for Civil Society.London: Asian Academic Press.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Penjelasannya.Jakarta: Media Wacana.UUD 1945
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju era Globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.